BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara agraris, tanah merupakan kebutuhan yang tidak dapat dilepaskan dari masyarakat terutama masyarakat dipesisir pantai baik sebagai petani kebun kelapa, nelayan ataupun usaha lainya dalam rangka pemenuhan kebutuhan hidup dan merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang harus dijaga dan dipelihara kelestariannya.

Negara Indonesia telah memiliki ketentuan khusus yang mengatur tentang pertanahan yaitu diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang selanjutnya disebut UUPA, sebagai peraturan dasar, Undang-Undang Pokok Agraria hanya mengatur asas-asas atau masalah-masalah pokok dalam garis besarnya berupa hukum pertanahan nasional. Undang-Undang Pokok Agraria ini merupakan implementasi dari Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang memberi landasan bahwa bumi, air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Hal ini dipertegas dengan Pasal 2 Undang-Undang Pokok Agraria mengenai hak menguasai dari negara.

Untuk mencapai tujuan tersebut, berdasar Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Pokok Agraria, kewenangan negara dalam bidang pertanahan mempunyai hak menguasai seluruh wilayah Republik Indonesia terhadap bumi, air dan ruang

angkasa serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, dengan wewenang untuk :¹

- a. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut;
- b. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa; dan
- c. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.

Kepastian hukum hak-hak atas tanah, khususnya menyangkut kepemilikan tanah dan penguasaannya akan memberikan kejelasan mengenai orang atau badan hukum yang menjadi pemegang hak atas tanah, maupun kepastian mengenai letak, batas-batas, luasnya dan sebagainya. Objek hukum tanah adalah Hak Penguasaan atas Tanah yang dibagi menjadi 2 (dua) bagian, atas tanah sebagai lembaga hukum. Hak penguasaan tanah ini yaitu :²

1. Hak penguasaan, belum dihubungkan dengan tanah dan orang atau badan hukum tertentu sebagai subjek atau pemegang haknya; dan
2. Hak penguasaan atas tanah sebagai hubungan hukum yang konkret. Hak penguasaan tanah ini sudah di hubungkan dengan hak tertentu sebagai objeknya dan orang atau badan hukum tertentu. Sebagai subjek pemegang haknya.

Dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Pokok Agraria tersebut di atas merupakan negara dalam pengertian sebagai suatu organisasi kekuasaan dari seluruh rakyat untuk mengatur masalah agraria (pertanahan). Kedudukan negara sebagai penguasa (Hak menguasai dari negara) tersebut tidak lain adalah bertujuan untuk mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dalam rangka masyarakat adil dan makmur. “Dalam kerangka tersebut negara diberi

¹ Suhanan Yosua, *Hak Atas Tanah Timbul (Aanslibbing) Dalam Sistem Hukum Pertanahan Indonesia*, Restu Agung, Jakarta, 2010, h. 38.

² Suyanto, *Pengantar Hukum Agraria*, Cetakan Pertama, Deepublish, Yogyakarta, 2023, h. 6.

kewenangan untuk mengatur mulai dari perencanaan, penggunaan, menentukan hak-hak yang dapat diberikan kepada seseorang, serta mengatur hubungan hukum antara orang-orang serta perbuatan-perbuatan hukum yang berkaitan dengan tanah”.³

Secara umum, penguasaan tanah dapat dibedakan menjadi dua, yaitu Tanah hak dan tanah negara. Tanah Negara adalah tanah yang telah dikuasai suatu hak atas tanah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku (tanah yang belum dihaki dengan hak perorangan), sedang tanah hak adalah tanah yang dipunyai oleh perorangan atau badan hukum dengan suatu hak atas tanah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, hanya terhadap tanah negara saja yang dapat dimintakan suatu hak untuk kepentingan tertentu dan berdasar proses tertentu. Tanah negara yang dapat dimohon menjadi tanah hak dapat berupa :⁴

1. Tanah negara yang masih kosong atau murni, tanah negara yang dikuasai langsung dan belum dibebani hak suatu apapun.
2. Tanah yang habis jangka waktunya, karena hak guna bangunan, hak guna usaha, hak pakai mempunyai masa berlaku yang terbatas, dengan lewatnya jangka waktu berlakunya maka hak atas tanah tersebut menjadi hapus dan tanahnya menjadi tanah negara. Bekas pemegang hak dapat memohon perpanjangan jangka waktu itu atau memohon hak yang baru diatas tanah itu.
3. Tanah negara yang berasal dari pelepasan hak oleh pemiliknya secara sukarela, pemegang hak atas tanah dapat melepaskan haknya dan dengan dilepaskannya hak itu maka tanah yang bersangkutan menjadi tanah negara.

Masalah hak atas tanah khususnya yang berkenaan dengan tanah timbul merupakan salah satu hal yang sangat penting karena menyangkut kepastian hukumnya. Dengan adanya jaminan kepastian hak atas tanah timbul akan mampu mencegah timbulnya keresahan sosial sehingga diharapkan mampu menciptakan

³ Herawan Sauni, *Politik Hukum Agraria*, Pustaka Bangsa Press Kampus USU, Sumatera Utara, 2006, h. 125.

⁴ *Ibid.*

suasana yang menguntungkan bagi kelanjutan pelaksanaan pembangunan di segala bidang, khususnya di bidang pertanahan.

Saat ini banyak ditemukan adanya penguasaan atas tanah timbul yang dilakukan oleh masyarakat. Masyarakat hanya menguasai tanah timbul tersebut secara fisik saja. Sedangkan penguasaan secara yuridis belum mereka dapatkan karna semua itu berkaitan dengan rencana tata ruang wilayah kota. Padahal penguasaan secara yuridis umumnya memberi wewenang kepada pemegang haknya untuk menguasai secara fisik tanahnya. Jadi tidak semua penguasaan secara yuridis atas tanah memberi wewenang kepada pemegang haknya untuk menguasai secara fisik tanahnya, karena yang namanya penguasaan secara yuridis tidak selalu diikuti dengan penguasaan secara fisik tanahnya.

Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) memberikan pemaknaan tentang penguasaan negara tersebut bukan sebagai pemilik atas tanah, tetapi memberikan kewenangan hak kepada negara sebagai organisasi kekuasaan dari bangsa Indonesia, sehingga dari makna tersebut negara sapa memberikan berbagai macam hak kepada perseorangan maupun badan hukum dengan memberikan hak untuk mempergunakan dan memanfaatkan tanah tersebut dengan mekanisme yang diatur oleh kementerian Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia.⁵

Peran negara menjadi penting menjadi pihak pertama yang mendata secara berkesinambungan setiap perubahan luas tanah timbul. Agensi pertanahan bisa mendata dan menentukan berapa luasan tanah timbul yang langsung akan dikuasai negara sesuai dengan regulasi Peraturan Menteri Agraria Nomor 17 Tahun 2016

⁵ Suyanto, *Hak Tanah Oloran (Aanslibbing) di Kecamatan Ujung Pangkah Kabupaten Gresik Prespektif Hukum Tanah Adat Dalam Sistem Hukum Pertanahan Nasional*, Jurnal Pena Justisia, Vol.22 No.2, Juni 2023, h. 3.

tentang Penataan Tanah Di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Dalam peraturan Menteri Agraria tersebut menjelaskan bahwa, Tanah timbul adalah daratan yang terbentuk secara alami karena proses pengendapan di sungai, danau, pantai, dan atau pulau timbul serta penguasaan tanahnya dikuasai oleh negara.

Dalam Peraturan Menteri Agraria Nomor 17 Tahun 2016 Pasal 15 menjelaskan bahwa tanah timbul merupakan tanah yang langsung dikuasai oleh negara yang meliputi pesisir laut, tepiann sungai, tepian danau dan pulau. Tanah timbul dengan luasan paling luas 100 m² (seratus meter persegi) merupakan milik dari pemilik tanah yang berbatasan langsung dengan tanah timbul dimaksud. Terhadap tanah timbul yang luasnya lebih dari 100 m² (seratus meter persegi) dapat diberikan Hak Atas Tanah dengan ketentuan:

- a. Penguasaan dan pemilikan tanah timbul harus mendapat rekomendasi Kementrian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
- b. Penggunaan dan pemanfaatannya sesuai dengan arahan peruntukannya dengan rencana tata ruang Wilayah Provinsi/Kabupaen/Kota, atau rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Sebagaimana contoh kasus mengenai tanah timbul atau *aanslibbing* di Desa Ujung Pangkah Kabupaten Gresik. Perubahan signifikan pada lanskap pesisir Ujung pangkah terjadi pada masa kolonial Hindia Belanda. Proses pembentukan tanah timbul ini bermula dari pembuatan kanal sepanjang 15 km dan selebar 100 m² oleh pemerintah Hindia Belanda di muara sungai Bengawan Solo pada 1893. Pada mulanya, sungai ini memiliki muara yang mulutnya mengarah ke arah timur atau ke arah Pulau Madura. Timbunan material di muara Bengawan Solo kala itu

memicu terjadinya tanah timbul di sebelah timur Kabupaten Gresik. Hal ini memunculkan kekhawatiran dari pejabat pemerintah pada masa itu akan terjadinya pendangkalan di Selat Madura yang bisa menimbulkan berbagai macam kerugian, salah satunya bisa terputusnya jalur pelayaran dari Laut Jawa ke Pelabuhan Gresik ataupun Surabaya. “Dalam peta geologi oleh Pringgokusumo (1983) memperlihatkan bahwa wilayah Gresik memang umumnya merupakan area yang terbentuk sejak era Miosen dari tanah alluvial, jenis tanah yang tidak terkonsolidasi, hasil erosi, bercampur pasir dan terakumulasi lama menurut aliran sungai dari dataran tinggi”.⁶

Maka mulut sungai berpindah ke utara. Pembuatan kanal yang mengubah arah muara sungai ini membuat pantai utara Kabupaten Gresik menjadi muara baru bagi sungai Bengawan Solo. Masyarakat yang tinggal di pantai utara menganggap penambahan tanah timbul ini sebagai berkah Tuhan yang perlu untuk dimanfaatkan, padahal kondisi lahan tanah timbul pada awalnya merupakan hutan mangrove yang subur dan lebat. Pasca kemunculan tanah timbul ini, masyarakat mulai merambah dan membuka lahan untuk dijadikan tambak. “Pemanfaatan lahan tanah timbul oleh masyarakat ini pada zaman kolonial belumlah secara masif, hanya orang-orang pemberani yang bisa mengubah hutan menjadi tambak. Kemudian pengelolaan tambak ini diteruskan dari satu generasi ke generasi berikutnya”.⁷

⁶ Yoppie Christian, et.al., *Iregularitas Agraria “Tanah Timbul” (Aanslibbing) Dan Perubahan Lanskap Di Wilayah Pesisir Ujung Pangkah, Gresik Jawa Timur*, Jurnal Agraria dan Pertanahan Vol.5 No.2, November 2019, h. 233.

⁷ *Ibid*, h. 234.

Isu hukum terkait kepemilikan tanah dari proses pengendapan arus sungai (delta) melibatkan beberapa aspek, sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) tidak secara eksplisit mengatur tanah delta. Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran juga tidak mengatur hak kepemilikan tanah delta. Serta dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup tidak secara spesifik mengatur tanah delta. Sehingga siapa yang berhak atas tanah delta tersebut, negara, masyarakat, atau individu. Lalu apakah tanah delta tersebut dapat digunakan untuk kegiatan ekonomi, seperti pertanian atau perumahan. Dari uraian isu hukum tersebut maka pemerintah seharusnya membuat peraturan yang jelas mengenai pengaturan kepemilikan dan penggunaan tanah delta (*aanslibbing*) agar tidak terjadi kekosongan hukum.

Penting kiranya peristiwa hukum yang sudah penulis paparkan di atas penulis angkat dalam penelitian kali ini, karena permasalahan hukum mengenai tanah timbul (*aanslibbing*) masih terjadi dan menimbulkan sengketa di masyarakat. Sehingga berlandaskan dari uraian latar belakang tersebut diatas penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitian ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul : Hak Kepemilikan Atas Tanah Yang Berasal Dari Proses Pengendapan Arus Sungai (*Aanslibbing*).

1.2. Rumusan Masalah

Dari rangkaian latar belakang masalah yang telah di uraikan di atas dapat di rumuskan masalah yang hendak dikaji adalah :

1. Bagaimana pengaturan hukum terkait kepemilikan tanah yang berasal dari proses pengendapan arus sungai (*aanslibbing*) berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria ?
2. Bagaimana pemberian hak atas sebidang tanah yang berasal berasal dari proses pengendapan arus sungai (*aanslibbing*) tersebut berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria ?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun dalam penelitian ini merupakan sebuah kegiatan yang bertujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan memahami pengaturan hukum terkait kepemilikan tanah yang berasal dari proses pengendapan arus sungai (*aanslibbing*) berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria.
2. Untuk mengetahui dan memahami, pemberian hak atas sebidang tanah yang berasal berasal dari proses pengendapan arus sungai (*aanslibbing*) tersebut berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria

1.4. Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam ilmu pengetahuan hukum, baik secara teoritis maupun secara prakti, yaitu:

1. Secara teoritis penelitian ini dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam rangka pengembangan khasanah ilmu pengetahuan khususnya dibidang

hukum perdata mengenai hak kepemilikan atas tanah yang berasal dari proses pengendapan arus sungai (*aanslibbing*) di Indonesia.

2. Secara praktis penelitian ini dapat menjadi salah satu landasan hukum, rujukan dan/atau referensi sesuai ketentuan hukum perdata mengenai ketentuan hukum tentang pemberian hak atas sebidang tanah yang berasal dari proses pengendapan arus sungai (*aanslibbing*) tersebut berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria

1.5. Tinjauan Pustaka

Dalam penelitian skripsi ini, peneliti menggali informasi dari pendapat para ahli hukum, teori-teori, asas-asas hukum dan beberapa peraturan yang menjadi konstruksi berfikir dalam menjawab pokok permasalahan.

1.5.1. Landasan Konseptual

Landasan konseptual merupakan suatu pengarah, atau pedoman yang lebih konkrit berisikan konsep-konsep umum atau tinjauan umum ketentuan dan pengertian serta hal hal yang berhubungan dengan pokok penelitian. Adapun landasan konseptual dalam penelitian ini yaitu: a) Pengertian Hak Atas Tanah; b) Macam-Macam Hak Atas Tanah; c) Tanah Timbul atau *Aanslibbing*

1.5.1.1. Pengertian Hak Atas Tanah

Tanah yang dulu dipandang dari sudut sosial, yang tercakup dalam lingkup hukum adat, hak ulayat dan fungsi sosial, kini mulai dilihat dari sudut ekonomi, sehingga tepat apabila “Perserikatan Bangsa-bangsa

mensinyalir bahwa saat ini masalah pertanahan tidak lagi menyangkut isu kemasyarakatan tetapi telah berkembang menjadi isu ekonomi”.⁸

Bertambahnya kegiatan atau aktivitas manusia setiap hari sangat berpengaruh pada pemanfaatan tanah tersebut. Sebutan tanah dapat kita pakai dalam berbagai arti, maka dalam penggunaannya perlu diberi batasan, agar diketahui dalam arti tersebut digunakan dalam hukum tanah, kata sebutan “tanah” dipakai dalam arti juridis, sebagai suatu pengertian yang telah diberi batasan resmi oleh Undang-Undang Pokok Agraria, dengan demikian bahwa tanah dalam pengertian yuridis adalah permukaan bumi ayat (1), sedang hak atas tanah adalah hak atas sebagian tertentu permukaan bumi, yang terbatas, berdimensi dua dengan ukuran panjang dan lebar, sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (1994) tanah adalah:⁹

- a. Permukaan bumi atau lapisan bumi yang diatas sekali;
- b. Keadaan bumi disuatu tempat;
- c. Permukaan bumi yang diberi batas; dan
- d. Bahan-bahan dari bumi, seperti: pasir, cadas, napal, dan sebagainya.

Tanah dalam arti hukum memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan manusia karena dapat menentukan keberadaan dan kelangsungan hubungan dan perbuatan hukum, baik dari segi individu maupun dampak bagi orang lain. “Untuk mencegah masalah tanah tidak sampai menimbulkan konflik kepentingan dalam masyarakat, diperlukan

⁸ Muhammad Yamin dan Rahim Lubis, *Beberapa Masalah Aktual Hukum Agraria*, Pustaka Bangsa Press, Medan, 2004, h. 26.

⁹ Budi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi Dan Pelaksanaannya*, Djambatan, Jakarta, 2007. h. 18.

pengaturan, penguasaan dan penggunaan tanah atau dengan kata lain disebut dengan hukum tanah”.¹⁰

Tanah merupakan sumber daya alam yang bisa mempunyai berbagai bentuk dan ukuran, bisa dilihat sebagai benda merupakan tempat tumbuh bagi tanaman dimana ukurannya adalah subur dan gersang, bisa juga sebagai benda diukur dengan ukuran besar atau isi (*volume*) misalnya satu ton tanah atau satu meter kubik tanah, dan akhirnya tanah bisa dipandang sebagai ruang muka bumi sesuai Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria (selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960) dimana ukurannya luas, misalnya ha, m², tombak, bahu dan sebagainya. Tanah dalam ukuran luas harus dipakai ditempat dimana tanah berada.

Belakangan ini ada usaha untuk mengganti istilah tanah dalam ukuran luas yang dikenal dengan istilah “lahan”. Usaha ini bertujuan baik, yaitu untuk memperkaya perbendaharaan kata-kata bahasa Indonesia. Akan tetapi tampaknya “lahan” dan “tanah” harus hidup berdampingan, karena istilah yang baru ini tidak akan bisa sepenuhnya mendesak mundur istilah yang lain. Hal ini disebabkan kata-kata seperti tanah air, tanah tumpah darah, tanah warisan, tanah wakaf, sertifikat tanah telah menjadi istilah baku secara historis maupun secara yuridis, dalam melaksanakan tugas mengemban Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria. Ada pula akhir-akhir ini diperkenalkan kata “ruang”, akan tetapi sampai saat ini

¹⁰ Wantijk Saleh, *Hak Anda Atas Tanah*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, h. 7.

belum ada yang dengan jelas dan tegas bisa mengatakan apa yang dimaksud dengan “ruang”, kalau bukan tanah permukaan bumi (Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960). Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007) membagi ruang atas ruang daratan (tanah), ruang lautan atau perairan dan ruang angkasa.

Berdasarkan pengertian tersebut, tampak bahwa tanah, lahan, dan ruang harus hidup berdampingan, tetapi harus diukung oleh landasan hukum yang benar. Perlu diperhatikan bahwa tanah sebagai ruang, di samping aspek fisik, mempunyai dua aspek lain yang penting, yaitu hak dan penggunaan.

Kebijakan penggunaan tanah di Indonesia dituangkan dalam Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria, bahwa tanah itu harus digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dengan berencana sesuai dengan Pasal 14 dan adanya kewajiban untuk memelihara dan menambah kesuburan tanah yang dipergunakan tersebut.

Pada Pasal 33 (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dikatakan bahwa “bumi air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh Negara”. Negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat. Hak menguasai dari negara termasuk dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Pokok Agraria memberi wewenang kepada negara untuk: mengatur

dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa; menentukan dan mengatur hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.

Hak pada hakekatnya adalah kekuasaan yang diberikan oleh hukum kepada Seseorang terhadap sesuatu (benda/prestasi), sehingga menimbulkan hubungan hukum antara keduanya (hubungan subjek objek). Jadi apabila seseorang memperoleh sesuatu hak atas tanah, maka pada orang tersebut telah melekat kekuasaan atas tanah yang disertai pula dengan kewajiban yang diperintahkan oleh hukum, dan perolehan hak atas tanah pada prinsipnya dapat dibedakan dalam:

1. Perolehan secara originair, yaitu perolehan secara asli, misalnya dengan membuka tanah (okupasi); dan
2. Perolehan secara derivatif, adalah perolehan karena terjadinya peralihan hak secara yuridis, misalnya jual - beli, tukar - menukar dan lain sebagainya.

Dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraria Menjelaskan bahwa Atas dasar hak menguasai dari Negara sebagai yang dimaksud dalam Pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain serta badanbadan hukum. Pasal ini memberi wewenang untuk mempergunakan tanah yang

bersangkutan demikian pula tubuh bumi dan air serta ruang yang ada di atasnya, sekedar diperlukan untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah itu dalam batas-batas menurut undang-undang ini dan peraturan-peraturan hukum lain yang lebih tinggi.

Hak atas tanah bersumber dari hak menguasai dari negara atas tanah dapat diberikan kepada perseorangan baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing, sekelompok orang secara bersama-sama, dan badan hukum baik badan hukum privat maupun badan hukum publik. Wewenang yang dimiliki oleh pemegang hak atas tanah terhadap tanahnya dibagi menjadi 2 (dua), yaitu:¹¹

1. Wewenang Umum; dan
Wewenang yang bersifat umum yaitu pemegang hak atas tanah mempunyai wewenang untuk menggunakan tanahnya, termasuk juga tubuh bumi dan air dan ruang yang ada di atasnya sekedar diperlukan untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah itu dalam batas-batas menurut Undang-Undang Pokok Agraria dan peraturan-peraturan hukum lain.
2. Wewenang Khusus.
Wewenang yang bersifat khusus yaitu pemegang hak atas tanah mempunyai wewenang untuk menggunakan tanahnya sesuai dengan macam hak atas tanahnya, misalnya wewenang pada tanah Hak Milik adalah dapat untuk kepentingan pertanian dan atau mendirikan bangunan, Hak Guna Bangunan (HGB) untuk mendirikan bangunan, Hak Guna Usaha (HGU) untuk kepentingan pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan.

1.5.1.2. Macam-Macam Hak Atas Tanah

Pengaturan yang membahas tentang menguasai hak-hak atas tanah diatur dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraria yang menyatakan bahwa " hak-hak atas tanah sebagai yang dimaksud dalam Pasal

¹¹ Urip Santoso, *Hukum Agraria dan Hak-Hak Atas Tanah*, Kencana Prenamedia Group, Jakarta, 2012, h. 50.

4 ayat (1) ialah atas dasar hak menguasai dari negara sebagai yang dimaksud dalam Pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain serta badan-badan hukum". Berikut merupakan macam-macam hak atas tanah berdasarkan sifatnya, yaitu:¹²

1. Hak atas tanah yang bersifat tetap yaitu hak atas tanah yang tidak terganti selama berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria dan belum dicabut digantikan dengan Undang-Undang yang baru yaitu : hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak sewa, hak membuka tanah dan hak memungut hasil hutan; dan
2. Hak atas tanah yang bersifat sementara yaitu hak atas tanah yang dalam waktu singkat akan dihapus karena mengandung sifat merugikan dan bertentangan dengan nilai Undang-Undang Pokok Agraria yaitu : hak gadai, hak usaha bagi hasil, hak menumpang, dan hak sewa tanah pertanian.

Dari segi asal tanahnya, hak atas tanah dibedakan menjadi 2 (dua) kelompok, yaitu :

1. Hak atas tanah yang bersifat primer yaitu hak atas tanah yang berasal dari tanah negara yaitu : hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan atas tanah negara, hak pakai atas tanah negara; dan
2. Hak atas tanah yang bersifat sekunder merupakan hak atas tanah yang berasal dari tanah pihak lain. Misalnya : hak guna bangunan atas tanah hak pengelolaan, hak guna bangunan atas tanah hak milik, dan hak sewa tanah pertanian. tanah diberikan dan dipunyai oleh orang dengan

¹² Nurus Zaman, *Hukum Politik Pengadaan Tanah*, Refika Aditama, Bandung, 2016, h. 13.

hak-hak yang disediakan oleh Undang-Undang Pokok Agraria untuk digunakan dan dimanfaatkan.

1.5.1.3. Tanah Timbul atau *Aanslibbing*

Tanah timbul dalam bahasa Inggris disebut dengan *deltaber* atau *channelbar*, selain itu dalam bahasa Belanda dikenal dengan istilah *aanslibbing*, lalu dalam bahasa Indonesia dikenal dengan tanah tumbuh atau tanah timbul. Secara umum, dalam lingkungan masyarakat Indonesia juga terdapat berbagai ragam istilah dalam menyebutkan tanah timbul ini. Hal ini dapat dimaklumi, karena di Indonesia terdapat berbagai ragam suku yang tentunya mempunyai perbedaan bahasa antara daerah yang satu dengan daerah yang lainnya, namun demikian istilah tersebut tetap memiliki makna dan pengertian yang sama.

Ada beberapa ahli yang memberikan definisi mengenai tanah timbul, antara lain yaitu:¹³

- a. Menurut Soedarsono dan Tominaga, terjadinya Tanah Timbul dikarenakan sungai mengalirkan air bersama-sama sedimen yang terdapat aliran air tersebut. Di bagian hulu kandungan sedimennya tinggi, tetapi sesampainya dibagian hilir terjadilah pengendapan membentuk endapan deluvial atau aluvial. Dengan terjadinya proses sedimentasi, maka terbentuklah daratan aluvial yang luas dan rata dan berkembang menjadi tempat berbagai kegiatan masyarakat;
- b. Menurut G.Kartasapoetro, tanah timbul atau *aanslibbing* adalah tanah yang terjadi akibat erosi berton-ton tanah yang dihanyutkan oleh air hujan yang menuju ke sungai-sungai besar dimana tanah hanyutan tersebut sebagian akan mengendap disepanjang sungai dan sebagian terus ke muara sungai yang bersangkutan. Akibat berkali-kali terjadi erosi maka terjadilah *aanslibbing* atau tanah timbul;
- c. Menurut Boedi Harsono, definisi tanah timbul adalah tanah pantai/laut/sungai yang selalu mendapatkan penambahan tanah/tanah

¹³ Masyithah Utrujjah Dwi Natsir, *Status Hukum Hak Penguasaan Atas Tanah Timbul (Aanslibbing) Oleh Masyarakat Dan Pemerintah Kota Makassar Kelurahan Barombang*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, 2016, h. 31.

- timbul baru, yang disebabkan oleh aliran sungai yang membawa endapan tanah hasil pengikisan kemudian mengalami pengendapan yang lama kelamaan membentuk tanah di tepi pantai. Pengendapan ini secara alami memakan waktu yang lama. Pertumbuhan ini membentuk tanah baru di tepi laut yang disebut lidah tanah atau *aanslibbing*; dan
- d. Menurut A.P. Perlindungan tanah timbul merupakan tanah yang terjadi karena penimbunan tanah di tepi pantai laut yang termasuk tanah ulayat dengan meminta izin kepada masyarakat hukum yang bersangkutan tanah timbul tersebut baik secara alami atau disengaja tidak menimbulkan hak atas tanah tetapi harus mengajukan permohonan untuk mendapatkan hak atas tanahnya kepada pemerintah.

Dari beberapa pengertian mengenai tanah timbul di atas menunjukkan Tanah Timbul yang terbentuk di tepi pantai disebabkan karena lumpur-lumpur yang dibawah arus sungai menuju laut dihempaskan kembali ke pantai oleh ombak air laut. Kemudian lumpur tersebut mengendap di pantai. Pembentukan Tanah Timbul terjadi karena proses alam dan bantuan manusia. Alam memiliki peran besar dalam mendukung terjadinya Tanah Timbul.

1.5.2. Landasan Yuridis

Landasan yuridis merupakan dasar hukum yang mengatur dan berhubungan dengan objek penelitian. Landasan yuridis dalam penelitian ini berkaitan dengan tanah *aanslibbing*. Tanah timbul, atau dalam istilah Belanda disebut *aanslibbing*, adalah daratan yang terbentuk secara alami akibat proses sedimentasi di tepi sungai atau pantai. Di Indonesia, pengaturan yuridis mengenai tanah timbul diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain, yaitu:

1. Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 Tahun 1960.

Dalam Pasal 2 ayat (1) menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan

alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ini berarti tanah timbul sebagai bagian dari bumi berada di bawah penguasaan negara. Dan dalam penjelasan Pasal 4 ayat (1) menyatakan bahwa atas dasar hak menguasai dari negara, ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi yang disebut tanah. Dengan demikian, pemberian hak atas tanah timbul harus melalui prosedur yang ditetapkan oleh negara.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah dijelaskan dalam Pasal 12 yang menyebutkan bahwa tanah timbul adalah daratan yang terbentuk secara alami maupun buatan karena proses pengendapan di sungai, danau, pantai, dan/atau pulau timbul. Penguasaan dan pemanfaatannya harus sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 63/PRT/1993 tentang Garis Sempadan Sungai, Daerah Manfaat Sungai, Daerah Penguasaan Sungai, dan Bekas Sungai. Sebagaimana penjelasan Pasal 8 huruf a bahwa menetapkan garis sempadan sungai tidak bertanggung di kawasan perkotaan minimal 10 meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai. Tanah timbul yang berada dalam garis sempadan ini tidak dapat diberikan hak milik, karena merupakan bagian dari penguasaan sungai.

4. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pelimpahan Kewenangan Penetapan Hak Atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah. Dalam Permen ini mengkonsolidasikan kewenangan formal dalam penetapan hak dan pendaftaran tanah, termasuk tanah timbul, berdasarkan kerangka hukum nasional dan teknis yang telah ada. Ini memastikan proses lebih efektif dan terstandar, sambil tetap berprinsip pada pengakuan status tanah timbul sebagai Tanah Negara.

Selain itu, dalam praktiknya, penguasaan tanah timbul sering kali dipengaruhi oleh hukum adat setempat. Masyarakat yang pertama kali menggarap dan memanfaatkan tanah timbul tersebut dengan itikad baik dapat diakui hak penguasaannya, meskipun secara yuridis formal status tanah tersebut tetap sebagai tanah negara hingga ada penetapan hak oleh pemerintah.

Untuk memperoleh hak atas tanah timbul, seseorang harus mengajukan permohonan kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) setempat dengan melampirkan bukti penguasaan fisik dan pemanfaatan tanah tersebut. Proses ini melibatkan pengukuran, penetapan status tanah, dan penerbitan sertifikat hak atas tanah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penting untuk diperhatikan bahwa penguasaan dan pemanfaatan tanah timbul harus sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dan tidak boleh

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk ketentuan mengenai perlindungan lingkungan hidup.

Dengan demikian, landasan yuridis mengenai tanah timbul (*aanslibbing*) di Indonesia didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang mengatur penguasaan, pemanfaatan, dan prosedur perolehan hak atas tanah tersebut, dengan tetap memperhatikan hukum adat dan kepentingan masyarakat setempat.

1.5.3. Landasan Teori

Landasan teori merupakan teori-teori yang digunakan oleh penulis sebagai dasar atau pedoman berpikir dalam penelitian. Adapun landasan teori dalam penelitian ini yaitu : a) Teori Kepastian Hukum; dan b) Teori Kepemilikan Tanah.

1.5.3.1. Teori Kepastian Hukum

Teori kepastian hukum merupakan salah satu dari tujuan hukum dan dapat dikatakan bahwa kepastian hukum merupakan bagian dari upaya untuk dapat mewujudkan keadilan. Kepastian hukum sendiri memiliki bentuk nyata yaitu pelaksanaan maupun penegakan hukum terhadap suatu tindakan yang tidak memandang siapa individu yang melakukan. Melalui kepastian hukum, setiap orang mampu memperkirakan apa yang akan ia alami apabila ia melakukan suatu tindakan hukum tertentu.

Kepastian hukum pun diperlukan guna mewujudkan prinsip-prinsip dari persamaan dihadapan hukum tanpa adanya diskriminasi. Dari kata kepastian, memiliki makna yang erat dengan asas kebenaran. Artinya, kata

kepastian dalam kepastian hukum merupakan suatu hal yang secara ketat dapat disilogismeka dengan cara legal formal.

Dengan kepastian hukum, maka akan menjamin seseorang dapat melakukan suatu perilaku yang sesuai dengan ketentuan dalam hukum yang berlaku dan begitu pula sebaliknya. Tanpa adanya kepastian hukum, maka seorang individu tidak dapat memiliki suatu ketentuan baku untuk menjalankan suatu perilaku. Sejalan dengan tujuan tersebut, Gustav Radbruch pun menjelaskan bahwa kepastian hukum merupakan salah satu tujuan dari hukum itu sendiri.

Gustav Radbruch menjelaskan, bahwa dalam teori kepastian hukum yang ia kemukakan ada 4 (empat) hal mendasar yang memiliki hubungan erat dengan makna dari kepastian hukum itu sendiri, diantaranya sebagai berikut, yaitu:¹⁴

1. Hukum merupakan hal positif yang memiliki arti bahwa hukum positif ialah undang-undangan;
2. Hukum didasarkan pada sebuah fakta, artinya hukum itu dibuat berdasarkan pada kenyataan;
3. Fakta yang termaktub atau tercantum dalam hukum harus dirumuskan dengan cara yang jelas, sehingga akan menghindari kekeliruan dalam hal pemaknaan atau penafsiran serta dapat mudah dilaksanakan; dan
4. Hukum yang positif tidak boleh mudah diubah.

Pendapat Gustav Radbruch mengenai kepastian hukum tersebut, didasarkan pada pandangannya mengenai kepastian hukum yang berarti adalah kepastian hukum itu sendiri. “Gustav Radbruch mengemukakan, bahwa kepastian hukum adalah salah satu produk dari hukum atau lebih

¹⁴ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, h. 19.

khususnya lagi merupakan produk dari perundang-undangan”.¹⁵ Berdasarkan pendapat dari Gustav Radbruch mengenai kepastian hukum, hukum merupakan hal positif yang mampu mengatur kepentingan setiap manusia yang ada dalam masyarakat dan harus selalu ditaati meskipun, hukum positif tersebut dinilai kurang adil. Lebih lanjut, kepastian hukum merupakan keadaan yang pasti, ketentuan maupun ketetapan

Selain Gustav Radbruch, Jan M. Otto pun turut berpendapat mengenai kepastian hukum yang disyaratkan menjadi beberapa hal sebagai berikut, yaitu:¹⁶

1. Kepastian hukum menyediakan aturan hukum yang jelas serta jernih, konsisten serta mudah diperoleh atau diakses. Aturan hukum tersebut haruslah diterbitkan oleh kekuasaan negara dan memiliki tiga sifat yaitu jelas, konsisten dan mudah diperoleh;
2. Beberapa instansi penguasa atau pemerintahan dapat menerapkan aturan hukum dengan cara yang konsisten serta dapat tunduk maupun taat kepadanya;
3. Mayoritas warga pada suatu negara memiliki prinsip untuk dapat menyetujui muatan yang ada pada muatan isi. Oleh karena itu, perilaku warga pun akan menyesuaikan terhadap peraturan yang telah diterbitkan oleh pemerintah;
4. Hakim peradilan memiliki sifat yang mandiri, artinya hakim tidak berpihak dalam menerapkan aturan hukum secara konsisten ketika hakim tersebut dapat menyelesaikan hukum; dan
5. Keputusan dari peradilan dapat secara konkrit dilaksanakan.

1.5.3.2. Teori Kepemilikan Tanah

“Menurut Murrad, Pertanahan adalah sebuah kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah yang berfungsi untuk mengatur hubungan

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT Sinar Grafika, Jakarta, 2011, h. 28.

hukum antara tanah dengan orang”.¹⁷ Pertanahan memiliki obyek yang sangat penting antara lain tanah dan pemegang haknya, “sehingga tanah dapat didefinisikan menurut Supriadi sebagai hak dasar untuk menguasai tanah Negara yang mana hak hak tersebut meliputi hak-hak atas permukaan bumi yang disebut dengan tanah. Tanah tersebut bisa dimiliki maupun diberikan kepada orang-orang maupun dimiliki seara bersama-sama serta dapat dimiliki oleh badan hukum”.¹⁸

“Tanah yang telah dimiliki oleh orang-orang maupun badan hukum haruslah memiliki hak kepemilikan atas tanah yang mana hak atas tanah tersebut dapat memberikan wewenang kepada pemegang hak atas tanahnya untuk mengelola tanah tersebut agar memberikan manfaat bagi pemegang hak atas tanah tersebut”.¹⁹ Dalam dunia pertanahan tidak luput dari sistem administrasi pertanahan yang memiliki peranan penting dalam pengurusan hak atas tanah sehingga “Murad menyimpulkan bahwa administrasi pertanahan merupakan sebuah kegiatan organisasi yang menjalankan kebijakan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah khususnya dalam bidang pertanahan dengan memanfaatkan dan menggerakkan sumber daya untuk mewujudkan tujuan perundang-undangan”.²⁰

Administrasi Pertanahan harus dapat memberikan pelayanan yang berkualitas mengingat kegiatan-kegiatan yang dilakukan berhubungan

¹⁷ Siti Hardianti Rukmana Manurung, *Strategi Badan Pertanahan Nasional Kota Pekanbaru Dalam Meminimalisir Permasalahan Tumpang Tindih Sertifikat Tanah (Overlapping) di Kota Pekanbaru*, Jurnal JOM FOSIP, Vol.4, No.2, 2017, h. 6.

¹⁸ *Ibid*, h. 7.

¹⁹ *Ibid*.

²⁰ *Ibid*.

dengan kepemilikan atas tanah sehingga masyarakat bisa mendapat jaminan kepastian hukum yang mudah melalui sistem administrasi pertanahan yang baik. “Tanah merupakan wadah untuk menggambarkan karakter seseorang dalam membangun identitas yang bermoral. Hak individu dengan tanah memiliki hubungan yang berkesinambungan dan tidak dapat dipisahkan”.²¹

Dunia Pertanahan erat kaitannya dengan konflik yang menimbulkan permasalahan di lingkungan masyarakat, sehingga hak memiliki peranan yang penting dalam kepemilikan atas tanah. Leon Duguit diperkuat dengan pandangan Carl Wellman memberikan penjelasan bahwa fungsi suatu hak dapat mengatasi konflik permasalahan serta dapat memberikan sebuah prioritas hukum. Dari pernyataan para ahli diatas dapat diambil kesimpulan bahwa fungsi hak berkaitan dengan pengakuan terhadap kepentingan pribadi sehingga mereka yang memiliki hak atas tanah memiliki kebebasan untuk bertindak terhadap tanah yang dihakinya. “Pendapat Leon Duguit diperkuat dengan pandangan Carl Wellman yang menyatakan fungsi suatu hak adalah untuk mengatasi konflik permasalahan dengan memberikan jendela hukum untuk memberikan ruang kepada seseorang dalam menyampaikan harapannya”.²²

1.6. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian yang dilakukan penulis, terdapat beberapa penelitian yang terdahulu sebagai bahan rujukan dan masukan dalam penelitian ini yaitu:

²¹ Triana Rejekiningsih, *Asas Fungsi Sosial Hak Atas Tanah Pada Negara Hukum (Suatu Tinjauan Dari Teori, Yuridis, dan Penerapannya di Indonesia)*, Jurnal Yustisia, Vol.2, No.5, 2016, h. 304.

²² *Ibid*, h. 306.

No	Keterangan	Uraian
1	Nama	Yoppie Christian, M. Asyief Khasan Budiman, Achmad Fahrudin, Nyoto Santoso
	Sumber	Jurnal Agraria dan Pertanahan Vol. 5 No. 2, November 2019
	Judul	Iregularitas Agraria “Tanah Timbul” (<i>Aanslibbing</i>) Dan Perubahan Lanskap Di Wilayah Pesisir Ujung Pangkah, Gresik Jawa Timur
	Perbedaan	Dalam penelitian ini memfokuskan terkait praktik iregularitas agraria merupakan satu masalah bagi jenis lahan yang eksistensinya dinamis seperti tanah timbul, maka kepastian teritorialnya harus mendapatkan prioritas perhatian oleh regulator pertanahan di daerah. Sedangkan dalam penelitian penulis berfokus pada Hak Kepemilikan Atas Tanah Yang Berasal Dari Proses Pengendapan Arus Sungai (<i>Aanslibbing</i>) dianalisa dengan Undang-Undang Pertanahan di Indonesia.
2	Nama	Masyithah Utrujjah Dwi Natsir
	Sumber	Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar 2016
	Judul	Status Hukum Hak Penguasaan Atas Tanah Timbul (<i>Aanslibbing</i>) Oleh Masyarakat Dan Pemerintah Kota Makassar Kelurahan Barombong
	Perbedaan	Dalam penelitian ini berfokus pada 1) Status penggunaan tanah timbul oleh masyarakat di Kelurahan Barombong, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar; dan 2) Pemerintah daerah Kota Makassar telah membuat kebijakan yang baik atas pemanfaatan tanah timbul di Kelurahan Barombong, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar. Sedangkan dalam penelitian penulis berfokus pada Hak Kepemilikan Atas Tanah Yang Berasal Dari Proses Pengendapan Arus Sungai (<i>Aanslibbing</i>) dianalisa dengan Undang-Undang Pertanahan di Indonesia.
3	Nama	Suyanto

	Sumber	Jurnal Pena Justisia, Vol. 22 No. 2, Juni 2023
	Judul	Hak Tanah Oloran (<i>Aanslibbing</i>) di Kecamatan Ujung Pangkah Kabupaten Gresik Prespektif Hukum Tanah Adat Dalam Sistem Hukum Pertanahan Nasional,
	Perbedaan	Hasil penelitian ini menemukan bahwa UUPA yang mengatur Undang-Undang pertanahan nasional memberikan pengakuan tanah atas tanah oloran (<i>aanslibbing</i>) yang bersumber dari hukum tanah adat sebagai tanah negara yang dapat diajukan hak dengan menggunakan ketentuan dalam Peraturan Kepala BPN Nomor 9 Tahun 1999 dengan memberikan hak pertama berupa Hak Kepemilikan, Hak Penggunaan dan Hak Penggunaan Bangunan. Sedangkan dalam penelitian penulis berfokus pada Hak Kepemilikan Atas Tanah Yang Berasal Dari Proses Pengendapan Arus Sungai (<i>Aanslibbing</i>) dianalisa dengan Undang-Undang Pertanahan di Indonesia.

Adapun yang menjadi perbedaan penelitian ini yakni dalam penelitian ini menggunakan judul penelitian terkait hak kepemilikan atas tanah yang berasal dari proses pengendapan arus sungai (*aanslibbing*). Dengan menggunakan dua rumusan masalah yakni : 1) Bagaimana pengaturan hukum terkait kepemilikan tanah yang berasal dari proses pengendapan arus sungai (*aanslibbing*) berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria; dan 2) Bagaimana pemberian hak atas sebidang tanah yang berasal berasal dari proses pengendapan arus sungai (*aanslibbing*) tersebut berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria.

Adapun yang menjadi persamaan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu yakni sama-sama meneliti tentang tanah *aanslibbing* namun terdapat perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu, yakni dalam penelitian ini lebih pada pengulasan materi tentang hak kepemilikan atas tanah

yang berasal dari proses pengendapan arus sungai (*aanslibbing*) dengan sebatas memberikan ulasan kasus pada latar belakang penelitian namun tidak menggunakan studi kasus dalam penelitian ini.

1.7. Metode Penelitian

Metode penelitian ini merupakan cara yang digunakan untuk mendapatkan data serta memperoleh jawaban yang akurat atas rumusan masalah diatas dengan mencari dan mengelola data dalam suatu penelitian.

1.7.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, penelitian hukum untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum. “Penelitian hukum normatif adalah proses penelitian untuk meneliti dan mengkaji tentang hukum sebagai norma, aturan, asas hukum, prinsip hukum, doktrin hukum, teori hukum dan kepustakaan lainnya untuk menjawab permasalahan hukum yang diteliti”.²³

Hasil dari penelitian ini memberikan diskripsi mengenai rumusan masalah yang diajukan, penelitian normatif hanya meneliti norma hukum, tanpa melihat praktek hukum di lapangan (*law in action*) mengenai penelitian terkait hak kepemilikan atas tanah yang berasal dari proses pengendapan arus sungai (*aanslibbing*).

1.7.2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan merupakan salah satu tahapan penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan bahan-bahan hukum dalam berbagai

²³ Suyanto, *Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif Empiris dan Gabungan*, Cetakan Pertama, Unigres Press, Gresik, 2022, h. 88.

aspek untuk mencari jawaban atas permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian ini. Adapaun dalam penelitian ini penulis menggunakan tiga metode pendekatan antara lain pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan historis (*historical approach*).

a. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*).

Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum. Pendekatan konseptual dilakukan guna dijadikan sebagai acuan untuk membangun argumentasi hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini yakni mengenai hak kepemilikan atas tanah yang berasal dari proses pengendapan arus sungai (*aanslibbing*). Adapun konsep-konsep yang dibahas dalam penelitian ini yakni: a) Pengertian Hak Atas Tanah; b) Macam-Macam Hak Atas Tanah; c) Tanah Timbul atau *Aanslibbing*.

b. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*).

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian. Dilakukan dengan cara menelaah dan mengkaji semua peraturan perundang-undangan yang

berkaitan dengan pokok permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini. Pendekatan perundang-undangan ini digunakan untuk mendapatkan ketentuan-ketentuan hukum guna untuk mempelajari konsistensi dan kesesuaian antara Undang-Undang yang satu dengan Undang-Undang lainnya. Adapun pendekatan perundang-undangan dalam penelitian ini yakni Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

c. Pendekatan Historis (*Historical Approach*).

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah latar belakang mengenai apa yang dipelajari dan perkembangan peraturan mengenai isu yang sedang dihadapi. Pendekatan ini mengungkap filosofi dan pola pikir yang melahirkan sesuatu yang sedang dipelajari. Adapun dalam pendekatan ini akan lebih difokuskan terkait hak kepemilikan atas tanah yang berasal dari proses pengendapan arus sungai (*aanslibbing*) berdasarkan hukum pertanahan di Indonesia.

1.7.3. Sumber Bahan Hukum (*Legal Sources*)

Bahan hukum yang dikumpulkan dalam penulisan untuk menjawab isu hukum penulisan ini yaitu: bahan hukum primer; bahan hukum sekunder; dan bahan hukum tersier.

1. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat seperti Norma dan Kaidah Dasar, Peraturan Dasar, Peraturan Perundang-Undangan. Bahan hukum primer yang digunakan adalah :

- a) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
- c) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
- d) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah;
- e) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 63/PRT/1993 tentang Garis Sempadan Sungai, Daerah Manfaat Sungai, Daerah Penguasaan Sungai, dan Bekas Sungai;
- f) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penataan Pertanahan Di Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil; dan
- g) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pelimpahan Kewenangan Penetapan Hak Atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti : buku-buku hukum, hasil-hasil penelitian, pendapat pakar hukum. Dalam penelitian ini penulis menggunakan buku, makalah, hasil penelitian dalam bidang

hukum, internet yang berkaitan dengan penelitian yang penulis lakukan.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti : Ensiklopedia hukum, kamus bahasa Indonesia, kamus hukum, internet, hal ini dilakukan untuk mendukung dan menunjang penelitian penulis.

1.7.4. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum

Berisi uraian logis prosedur pengumpulan bahan-bahan hukum primer, skunder, serta bahan hukum tersebut diinventarisasi dan diklarifikasi dengan menyesuaikan masalah yang dibahas. Dalam penelitian hukum normatif, teknik pengumpulan bahan hukum sebagai berikut:

Bahan hukum primer berupa perundang-undangan dikumpulkan dengan metode inventarisasi dan kategorisasi. Bahan hukum sekunder dikumpulkan dengan sistem kartu catatan (*card system*), baik dengan kartu ikhtiar (memuat ringkasan tulisan sesuai aslinya, secara garis besar dan pokok gagasan yang memuat pendapat asli penulis), maupun kartu ulasan (berupa analisis dan catatan khusus penulis).

Dalam penelitian hukum normatif yuridis, teknik pengumpulan bahan hukum sebagai berikut:

- 1) Bahan hukum priemer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan;

- 2) Bahan hukum sekunder berupa publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan media daring.

1.7.5. Teknik Analisa Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini berdasarkan data yang ada dilakukan secara yuridis kualitatif, yaitu tidak hanya mengungkapkan kebenaran belaka tetapi juga memahami kebenaran tersebut menurut aturan perundang-undangan. Dengan memberikan gambaran permasalahan tentang hak kepemilikan atas tanah yang berasal dari proses pengendapan arus sungai (*aanslibbing*) dianalisis berdasarkan aturan hukum yang berlaku di Indonesia dan fakta di lapangan untuk kemudian diperoleh kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan yang diajukan.

1.8. Sistematika Penulisan

Untuk lebih mengetahui dan mempermudah dalam melakukan pembahasan, penganalisaan, dan penjabaran isi dari penelitian ini, maka dalam penulisan skripsi ini penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab I menerangkan Pendahuluan yang berisikan tentang Latar Belakang Permasalahan, Rumusan Masalah, Kajian Pustaka, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Orisinalitas Penelitian, Kajian Pustaka yang terdiri dari Landasan Teori Dan Penjelasan Konsep, Metode Penelitian terdiri atas Jenis Penelitian, Pendekatan Masalah, Sumber Bahan Hukum, Teknik Pengumpulan dan

Pengolahan Bahan Hukum, Analisis Bahan Hukum, dan diakhiri dengan Pertanggung Jawaban Sistematika Penulisan.

Bab II membahas tentang Pengaturan Hukum Terkait Kepemilikan Tanah Yang Berasal Dari Proses Pengendapan Arus Sungai (*Aanslibbing*). Dengan sub bab diantaranya: Proses Terjadinya Tanah Timbul; Hak Penguasaan Atas Tanah Oleh Negara; Pemberian Hak Atas Tanah Negara; dan Pengaturan Hukum Terkait Kepemilikan Tanah Yang Berasal Dari Proses Pengendapan Arus Sungai (*Aanslibbing*) Berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria.

Bab III membahas tentang Pemberian Hak Atas Sebidang Tanah Yang Berasal Dari Proses Pengendapan Arus Sungai (*Aanslibbing*) Berdasarkan Perundang-Undangan di Indonesia. Dengan sub bab diantaranya: Pemberian Hak Atas Tanah Timbul Sebagai Tanah Negara; Status Tanah Timbul Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; Status Tanah Timbul Dalam Perspektif Hukum Adat; dan Pemberian Hak Atas Sebidang Tanah Yang Berasal Berasal Dari Proses Pengendapan Arus Sungai (*Aanslibbing*) Berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria.

Bab IV sebagai penutup, memuat beberapa kesimpulan dari jawaban permasalahan-permasalahan yang dibahas, serta sebagai saran bagi pihak yang berkaitan dalam penulisan skripsi ini.